

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R. Salaiman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana
- Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum (Edisi Revisi)*, Padang: Angkas Raya.
- Eka Deviani dan Rifka Yudhi, 2022, *Hukum Kepegawaian: Historitas dan Aktualitas Aparatur Sipil Negara*, Lampung: Pusaka Media.
- Fahmi Idrus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Greisinda Press Surabaya.
- Hasan Zaini, 1990, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Isharyanto, 2016, *Ilmu Negara*, Karanganyar: Oase Pustaka.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- _____, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Khairul Fahmi (Ed), 2016, *Pengisian Jabatan Publik Dalam Ranah Kekuasaan Eksekutif (Seri 2)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmuzar, 2013, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 45 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Bandung: Nusa Media.
- Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Miriam Budiarto, 2010, *(Edisi Revisi) Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muh. Affan, 2017. *Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Tifa Foundation.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soeroso, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Utrecht, 1998, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

C. Jurnal

Agustina, 2018, “Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2, No. 1.

Ahmad Rijali, 2019, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Aljadrah*, Vol. 17, No. 33.

Ahmad Yani, 2018, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12, No. 2.

Amin Rahmad Panjaitan dan Irwansyah, 2023, “Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2.

Andri Yanto dan Harry Nugraha, 2021, “Redesain Pengisian Menteri Dalam Sistem Presidensial di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, hlm 139-140.

- Christin Nathania Liu dkk, 2022, “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 5.
- Dita Rosalia Arini, 2022, “Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.3, No. 2.
- Dzikri Ghufanillah dan Sri Wahyuni, 2022, “Telaah Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan dalam Sistem Ketatanegaraan Ditinjau dari Asas Kedaulatan Rakyat”, *Jurnal Res Publica*, Vol. 06, No. 03.
- Fadila Muajaba Kasanah dan Dian Suluh Kusuma Dewi, 2022, “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008”, *Jurnal Governance Inovation*, Vol. 4 No. 2.
- Fariz Monteza, 2023, “Urgensi Pembatasan Kewenangan Presiden Pada Perubahan Nomenklatur Kementerian Negara”, *UNJA Journal of Legal Studies*, Vol. 01, No. 01.
- Febriansyah Kurniawan dan Retno Sari Handayani, 2022, “Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia”, *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, Vol. 4, No. 2.
- I Komang Trisna Putra, 2022, “Pengaturan Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.8, No. 2.
- Ismail Koto, 2021, “Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Cered Indonesia*, Vol. 1, No. 1.
- Muhammad Rezky Pahlawan, 2018, “Tinjauan Teoritis Keputusan Pejabat Negara Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Negara Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 01, No. 2.
- Muhammad Anfasha Wirakusuma dan Jadmiko Anom Husodo, 2023, “Mahkamah Konstitusi Dalam Pelarangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019)”, *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol.7, No.2.
- Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, dan Surya Anoraga, 2021, “Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik

Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Indonesia Law Reform Journal, Vol. 1, No. 1.

Romadhan Lubis, 2023, “Menteri Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Indonesia”, Journal Of Juridische Analyse, Vol. 2, No. 2.

Roziqin dan Ibnu Sofyhan, 2023, “Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal de Jure, Vol. 12, No. 1.

Suci Monawati Sukma, 2021, “Problematika Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)”, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1, No. 3.

Suhaimi, 2018, “Problem dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”, Jurnal Yustitia, Vol. 19, No. 2.

Sul-toni Fikri dan Anang Fajrul Ukhwaluddin, 2022, “Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Iran”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.08, No. 01.

Tria Noviantika dan M. Shofwan Taufiq, 2021, “Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”, Muhammadiyah Law Review, Vol. 05, No. 1.

Wahyu Gunawan, 2018, “Kekuasaan dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensiil di Indonesia”, Jurnal Jurist Diction, Vol. 1, No.1

D. Website

Aditya Wahyu Saputro, 2023, *Perbedaan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan Serta Contohnya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan-lt52f38f89a7720/>.

Agatha Vidya Nariswari, 2023, *10 Menteri Jokowi yang Rangkap Jabatan, Bukan Cuma Erick Thohir dan Zainudin Amali*, diakses dari <https://www.suara.com/news/2023/02/18/132404/10-menteri-jokowi-yang-rangkap-jabatan-bukan-cuma-erick-thohir-dan-zainudin-amali>.

- Ahdi Ahdiat, 2023, *Pemerintah Kucurkan Dana Bantuan Partai Politik Rp 126 Miliar Terbanyak Untuk PDIP*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/14/pemerintah-kucurkan-dana-bantuan-parpol-rp126-m-terbanyak-untuk-pdip>.
- Ria Rizki Nirmala Sari, 2023, *Erick Thohir Rangkap Jabatan Dilarang Undang-Undang, Diperbolehkan Jokowi*, diakses dari <https://www.suara.com/news/2023/02/18/104837/erick-thohir-rangkap-jabatan-dilarang-undang-undang-diperbolehkan-jokowi>.
- Pengelola Website FITRA, 2023, *Anggaran Negara Dilahap Para Pejabat yang Merangkap*, diakses dari <https://seknasfitra.org/anggaran-negara-dilahap-para-pejabat-yang-merangkap/>.
- Saiful Anam, 2023, *Mengakhiri Rangkap Jabatan Pejabat*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/13/13452411/mengakhiri-rangkap-jabatan-pejabat?page=all>.
- Serafica Gischa dan Nibras Nada Nilufar, 2019, *Kementerian Negara: Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi*, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/23/080000169/kementerian-negara-tugas-fungsi-dan-susunan-organisasi>.
- Vincent Fabian Thomas dan Bayu Septianto, 2019, *Potensi Korupsi Saat Ketua Umum Parpol Rangkap Jabatan Menteri*, diakses dari <https://tirto.id/potensi-korupsi-saat-ketua-umum-parpol-rangkap-jabatan-menteri-ekgt>.

